

# RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2023

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, dengan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipanya, sehingga penyusunan Rencana Kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan

mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Tasikmalaya, 29 Juli 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tasikmalaya,



Drs. Yayat Suryatna  
NIP 19660604 199303 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA     PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	32
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT     DAERAH .....</b>	<b>39</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	43

<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	55
5.2 Rencana Tindak Lanjut .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.....	18
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 .....	20
Tabel 2.4	Matriks terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	25
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya .....	32
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 .....	42
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	44
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tindak Lanjut Renja dalam Proses Penyusunan APBD .....	4
Gambar 3.1	Visi, Misi, Arahana Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024...	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2022 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Rencana kerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.



Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023 disusun melalui enam tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu :

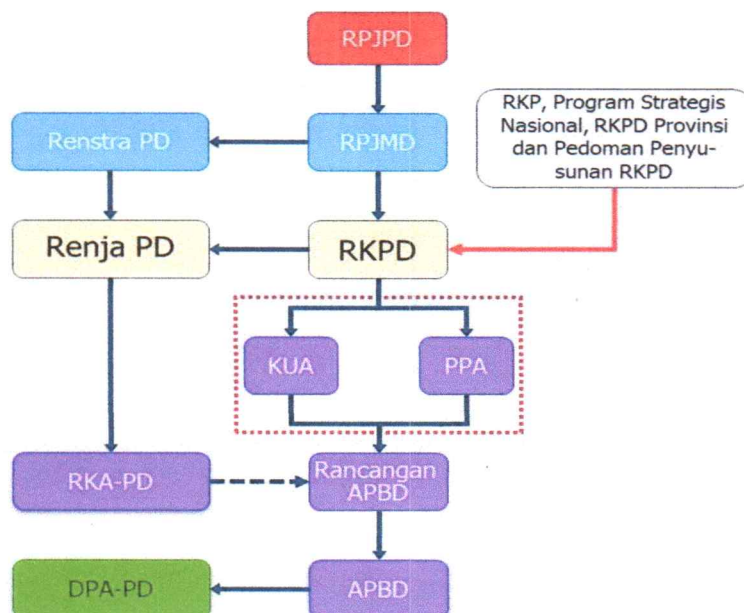
1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat

Daerah tahun berjalan;

3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan rancangan awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Forum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/lintas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tindak lanjut dokumen Renja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.1.  
Tindak Lanjut Renja dalam Proses Penyusunan APBD



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten

Tasikmalaya tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 56 tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
16. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0002 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 dimaksudkan untuk mensinergikan program regional dan sectoral, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 atau sumber dana lainnya;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna Menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2023.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan atau kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan proiritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas



dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 dan perkiraan capaiannya di tahun 2022, adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	<b>PROGRAM PENUKLIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD Nilai IKM Dinas PMD	63 79,60		n/a n/a		55 76,61			
01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42		n/a		8	1	2.38%	
01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	12		n/a		3	1	8.33%	
01 201 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12		n/a		3	0	0%	
01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18		n/a		0	0	0%	
01 202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</b>	<b>400%</b>				<b>100%</b>			
01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5,664		23	23	100	336		
01 206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>400%</b>				<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>8.93%</b>	
01 206 02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48		n/a		12	6	12.50%	
01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16		n/a		12	6	40%	
01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	37		n/a		12	3	8%	
01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48		n/a		12	6	13%	
01 206 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tertaksanannya fasilitas kunjungan tamu	48		n/a		12	6	13%	
01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksanannya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48		n/a		12	3	6%	
01 206 11	Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		n/a		0	0	0%	
01 207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor</b>	<b>400%</b>				<b>100</b>	<b>200</b>	<b>50%</b>	
01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	220		n/a		55	110	50%	
01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	43		n/a		n/a	0	0%	
01 207 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1		n/a		n/a	0	0%	
01 207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1		n/a		n/a	0	0%	
01 208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>400%</b>				<b>100</b>	<b>50</b>	<b>12.50%</b>	
01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48		n/a		12	6	12.50%	
01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48		n/a		12	0	0%	
01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48		n/a		12	6	12.50%	
01 209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>400%</b>				<b>100</b>	<b>40</b>	<b>10.01%</b>	
01 209 01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	52		n/a		13	13	25%	
01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52		n/a		13	0	0%	
01 209 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4		n/a		1	0	0%	
2 13 03	<b>Program peningkatan kerjasama desa</b>	<b>Cakupan Fasilitas kerjasama desa</b>	<b>400</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2 13 03 201	<b>Facilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Dokumen kerjasama antar desa yang terfasilitasi</b>	<b>508</b>				<b>n/a</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2 13 03 201 01	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	251		n/a		n/a	0	0.00%	
2 13 03 201 02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	7		1	1	100%	2	14.29%	
2 13 03 201 03	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	251		n/a		n/a	0	0%	
2 13 02	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa</b>	<b>400</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2 13 02 201	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang melakukann Penataan status Desa</b>	<b>1,324</b>				<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

2	13	02	201	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penataan Status Desa	1,324				290	0	0%
2	13	02	201	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	321		n/a	70	0	0%
2	13	02	201	02	fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	321		n/a	70	0	0%
2	13	02	201	03	fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	321		n/a	70	0	0%
2	13	02	201	04	fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	20		n/a	5	0	0%
2	13	02	201	05	fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	20		n/a	5	0	0%
2	13	02	201	06	fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	321		n/a	70	0	0%
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500			100	0	0%
2	13	04	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang sesuai aturan	500			100	51	10.29%
2	13	04	201	01	fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,404		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	02	fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	300		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	03	fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	04	fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1,404		n/a	351	103	5.87%
2	13	04	201	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	182,000		n/a	48,000	24,000	12.50%
2	13	04	201	06	fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	801		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	351		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	10	fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	240		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	11	fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	12	fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	13	fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	8,424		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	15	fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	16	fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	04	201	17	Pelaksanaan Pengawasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1,404		n/a	351	88	6.27%
2	13	04	201	18	fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,053		n/a	0	0	0%
2	13	05		03	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	1,839			350	0	0%
2	13	05	201	03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Desa yang mendapatkan Pembinaan	1,839			350	0	0%

2	13	05	201	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poeyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poeyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poeyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poeyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	255	180	0	0	0%
2	13	05	201	04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poeyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS, TMMD.)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poeyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	121	n/a	4	0	0%
2	13	05	201	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	18	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	08	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Kerteban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Kerteban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	n/a	1	1	25.00%
2	13	05	201	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	456	n/a	0	0	0%
2	13	05	201	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	420	n/a	0	0	0%

### 2.1.1 Analisis Atas Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian khusus atas evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, diantaranya total anggaran belanja langsung Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebesar Rp 1,682,934,187,- dengan penyerapan sebesar Rp 329,675,876,- atau dengan realisasi anggaran

sebesar 19,59%.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai satu Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjang oleh 4 program, 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Adapun realisasi penyerapan per program dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 766.835.321,- terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 107.138.426,- atau sebesar 13,97%.
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp 250.000.000,- terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 198.538.450,- atau sebesar 79,41%.
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 450.000.000,- terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 18.000.000,- atau sebesar 0,04%.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan pagu anggaran Rp 216.065.000,- terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.000.000,- atau sebesar 0,02%.

### **2.1.2 Permasalahan dan Solusi**

Dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dan juga masih terdapat masalah dalam penerepannya. Sehingga diperlukan rumusan masalah dan solusi yang efektif dalam rangka evaluasi dan perbaikan

pada tahun anggaran selanjutnya. Adapun masalah dan Solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Permasalahan

- a. Masih belum optimalnya metode pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### 2. Solusi

- a. Melaksanakan evaluasi dan reviu secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya dan melakukan penyesuaian pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

#### **2.1.3 Implikasi yang terjadi dan kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran**

Implikasi yang terjadi dikarenakan pencapaian target, diantaranya adalah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas yang baru terbentuk sehingga sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang masih minim

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidakcapaian program/kegiatan yaitu :

- a. Melakukan *refocusing* anggaran untuk ditujukan kepada skala prioritas yang dibentuk, agar penempatan pos penganggaran tepat guna;
- b. Mengoptimalkan kinerja berbasis non anggaran di

lingkup perangkat daerah, melalui proses penguatan pendataan sebagai bahan *re-plan* dan/atau untuk bahan penyusunan perencanaan pada anggaran selanjutnya.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan



Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana desa;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas.

Untuk menjabarkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dan target sasaran yang ditetapkan serta proyeksi untuk tahun 2021-2026, berikut tabelnya :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan	Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	83,33	85,71	90	90	
2	Persentase Posyandu aktif	%	98,11	98,11	85,00	90,00	
3	Cakupan Pembinaan BUMDES	%	96,01	96,01	98,01	98,01	
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53	14,53	14,53	14,53	
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	Skor	63,14	72,65	73	73	

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa “Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)”.

Berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari peraturan diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan IKU sesuai dengan core business yang diemban. Adapun urusan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yaitu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari urusan ini telah dirumuskan IKU yang dirasa mewakili sasaran pada setiap urusan yang diemban. Adapun matrik dampak

Kinerja Utama oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Tahun 2022

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	24.78	26.21	46.43	177,00
2	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0.28	0.57	0	0,00
3	Persentase Posyandu aktif	%	100	98.11	100	101,92
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	-	61	22,72	37,24

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Masih minimnya kompetensi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan penunjang dalam pelaksanaan kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja;

- c. Belum teralokasikannya anggaran untuk pelaksanaan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi Kepala Desa yang baru;
- d. Belum meratanya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
- e. Banyaknya regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, dipandang perlu adanya kesamaan persepsi dan pemahaman khususnya dalam tataran implementasi melalui Focus Group Discussion (FGD) antara Perangkat Daerah terkait;
- f. Belum optimalnya peran Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya.

### **2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Terhadap Capaian Program Nasional**

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah antara lain:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa;
- b. Peningkatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa;
- c. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **a. Tantangan**

Dalam Pengembangan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut;
2. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistic dan individualistic;
3. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan social masyarakat;
4. Kecenderungan heterogenitas tatanan social masyarakat;
5. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsive, konsisten dan akuntabel;
6. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

#### **b. Peluang**

Selain tantangan tersebut diatas, terdapat pula peluang-peluang antara lain:

1. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat;
2. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah

satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar;

3. Adanya komitmen Pemerintah Pusat terhadap program percepatan pembangunan di Indonesia

### **2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak terhadap visi misi Kepala Daerah, peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa adalah menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar tingkat pendidikan aparatur pemerintahan desa masih rendah;
2. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat desa;
3. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di setiap desa, dimana tugas pokok dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai pelopor, penggerak, pelaksana teknis, perencanaan partisipatif dan mitra kerja kepala Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa lainnya;
4. Masih adanya desa yang belum membentuk Bumdes;
5. Adanya Kepala Desa yang baru terpilih dan BPD yang baru terbentuk;
6. Isu aktual di tahun 2023 adalah Pemilihan Kepala Desa

yang merupakan tahap dua gelombang kedua yang akan melibatkan pemilihan 67 Kepala Desa di Kab. Tasikmalaya.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2023 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 seperti terdapat dalam tabel berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023

Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	55,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	55,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 Laporan	33,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 Laporan	33,000,000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	22,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	22,000,000	



Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	3,900,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	3,900,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	3,900,000,000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	100,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000
Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	200,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	200,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	200,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180,000,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	250,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	250,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	250,000,000
Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	85,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	85,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	85,000,000

<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>													
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa													
Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	351 Desa	200,000,000	351 Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	351 Desa	200,000,000	351 Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	200,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	351 Desa	200,000,000	351 Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	351 Desa	200,000,000	351 Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	200,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	10 Unit	200,000,000	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	10 Unit	200,000,000	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	200,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>													
Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa													
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	200,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	200,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	200,000,000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>													
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	150,000,000

Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	150,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	150,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	150,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	150,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	600,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	600,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	250,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	250,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	50,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	50,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	75,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	75,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	150,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	150,000,000
	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	300,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	300,000,000

Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penguatan Batas Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penguatan Batas Desa	351 Desa	50,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penguatan Batas Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penguatan Batas Desa	351 Desa	50,000,000
Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan					Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan				
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Melakukannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	351 Lembaga	500,000,000	Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	351 Lembaga	500,000,000

Sub Kegiatan Fasilitas Prasarana Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS & TMMD)	10 Unit	250,000,000	10 Unit	250,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS & TMMD)	10 Unit	250,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen hasil fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	500,000,000	Jumlah dokumen hasil fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	500,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam memanfaatkan/Fasilitas TTTG	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam memanfaatkan/Fasilitas TTTG	2 Laporan	250,000,000	2 Laporan	250,000,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam memanfaatkan/Fasilitas TTTG	2 Laporan	250,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas BBGRM	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam memanfaatkan/Fasilitas BBGRM	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam memanfaatkan/Fasilitas BBGRM	1 Laporan	150,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	1,350,000,000	2 Dokumen	1,350,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	1,350,000,000
				12,610,000,000		12,610,000,000			12,610,000,000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Berikut tabel usulan pemangku kepentingan :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kp. Nagrog RT 012 RW 003 Desa Padasuka Kec. Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Orang	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kp. Nanggewer Kec. Pagerageung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Gazebo besar dengan ukuran 10 m x 20 m	Ditolak, tidak sesuai dengan sub kegiatan
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa Cikubang Kec. Taraju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	11 Kelompok	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023

4	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Purwarahayu Kec. Taraju	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
5	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dusun Sukahurip RT 011 RW 03 Desa Cikondang Kec. Cineam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
6	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah kelompok Ekonomi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 unit Food Court/stand	Ditolak, tidak sesuai dengan sub kegiatan
7	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tenjowaringin Kec. Salawu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
8	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Kersagalih Kec. Jatiwaras	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
9	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Mandalahayu Kec. Salopa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Sarana dan Prasarana di 10 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
10	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Pasirhuni Kec. Ciawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit Timbangan Dacin	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023

11	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Gombang Kec. Ciawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
12	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Sukarapih Kec. Sukarame	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
13	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Gunungsari Kec. Cikatomas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
14	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Rajadatu Kec. Cineam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
15	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Bojongsari Kec. Gunungtanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
16	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tanjungsari Kec. Gunungtanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
17	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cigalontang Kec. Cigalontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023



18	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cipatujah Kec. Cipatujah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
19	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Ds. Citalahab, Kec. Tanjungjaya	Jumlah peran serta pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan/Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitas TTG	1 Unit Mesin Pengolah Pakan Ternak	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
20	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cipicung Kec. Culamega	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
21	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa Mekarsari Kec. Pancatengah	Jumlah kelompok Ekonomi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Kelompok	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
22	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
23	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa Pasirbatang Kec. Manonjaya	Jumlah kelompok Ekonomi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitas Destinasi Wisata	Ditolak, tidak sesuai dengan sub kegiatan
24	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Margajaya Kec. Mangunreja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
25	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Sundakerta Kec. Sukahening	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023

26	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Leuwidulang Kec. Sodonghilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
27	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Mangunreja Kec. Mangunreja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Unit Posyandu (Peralatan dan Perlengkapan)	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
28	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Ciawi Kec. Karangnunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
29	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Ds. Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya	Jumlah peran serta pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan/Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitas TTG	50 Orang	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
30	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa Cileuleus Kec. Cisayong	Jumlah kelompok Ekonomi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 unit UEM	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
31	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cikunir Kec. Singaparna	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
32	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Pakalongan Kec. Sodonghilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
33	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Desa Cileuleus Kec. Cisayong	Jumlah peran serta pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan/Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitas TTG		Ditolak, tidak sesuai dengan sub kegiatan

34	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cileuleus Kec. Cisayong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
35	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Sukaraharja Kec. Cisayong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
36	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cikalong Kec. Sodonghilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023
37	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Cilolohan Kec. Tanjungjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Unit Posyandu	Telah dimuat dalam Ranwal Renja 2023

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



Gambar 3.1 Visi, Misi, Arahana Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa urusan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas dan fungsi, merujuk kepada Misi Nomor 1 dan 2, yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; serta Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” serta berorientasi kepada agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dapat melakukan pembangunan berdasarkan visi, misi dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Sehingga ke setiap pembangunan yang telah dilakukan berdasar atau sesuai dengan arah pembangunan nasional, menjadikan Kabupaten Tasikmalaya kontributor aktif terhadap capaian pembangunan yang ditetapkan pada kebijakan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yang hendak dicapai adalah “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Dalam mencapai visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Misi Ke-3 (Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata). Memperhatikan hal yang ada, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
	<b>TUJUAN : Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa</b>		
1	SASARAN : Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	11.00%
		Persentase Posyandu aktif	90.00%
2	SASARAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel	73%
3	SASARAN : Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Cakupan sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik	73%
4.	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61



### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah:

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah mengacu pada program yang terdapat pada Permendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada program dan kebijakan nasional.
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah mengacupada program yang terdapat pada dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021- 2026.



Tabel 3.2

T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Unit Penanggung Jawab	
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur		Target
2.13	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2.13 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD, Nilai IKM Dinas PMD											DPMD
2.13 01.2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												DPMD
2.13 01.2 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kab. Tasikmalaya			4 Dokumen	50,000,000	DAU		55,000,000	DPMD
2.13 01.2 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Tasikmalaya			16 Laporan	16,650,000	DAU		33,000,000	DPMD
2.13 01.2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												DPMD
2.13 01.2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Tasikmalaya			27 Orang/Bulan	3,604,095,111	DAU		3,900,000,000	DPMD
2.13 01.2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah												DPMD

2.13	01.2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Paket	60,000,000	DAU	100,000,000	DPMD
2.13	01.2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Paket	40,000,000	DAU	200,000,000	DPMD
2.13	01.2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Paket	12,000,000	DAU	50,000,000	DPMD
2.13	01.2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	6,686,000	DAU	20,000,000	DPMD
2.13	01.2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	10,500,000	DAU	200,000,000	DPMD
2.13	01.2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	65,000,000	DAU	180,000,000	DPMD
2.13	01.2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	50,000,000	DAU	0	DPMD
2.13	01.2	08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>DPMD</b>
2.13	01.2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	73,250,000	DAU	300,000,000	DPMD

2.13	01.2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan		150,000,000	150,000,000	DPMD
2.13	01.2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan		104,400,000	250,000,000	DPMD
2.13	01.2	09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>DPMD</b>
2.13	01.2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Tasikmalaya	20 Unit		100,000,000	180,000,000	DPMD
2.13	01.2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Kab. Tasikmalaya	10 Unit		20,000,000	60,000,000	DPMD
2.13	01.2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya	1 Unit		17,500,000	300,000,000	DPMD
2.13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa</b>		<b>100%</b>				<b>DPMD</b>
2.13	02.2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>								<b>DPMD</b>
2.13	02.2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Tasikmalaya	351 Desa		150,000,000	200,000,000	DPMD

2.13	02.2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Tasikmalaya	351 Desa	150,000,000	DAU	200,000,000	DPMD
2.13	02.2	01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Tasikmalaya	10 Unit	150,000,000	DAU	200,000,000	DPMD
2.13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik</b>		<b>351 Desa</b>				<b>DPMD</b>
2.13	04.2	01		<b>Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>							<b>DPMD</b>
2.13	04.2	01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	150,000,000	DAU	150,000,000	DPMD
2.13	04.2	01	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	150,000,000	DAU	150,000,000	DPMD
2.13	04.2	01	05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Tasikmalaya	351 Orang	6,121,969,140	DAU	600,000,000	DPMD
2.13	04.2	01	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	200,000,000	DAU	250,000,000	DPMD
2.13	05			<b>Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Jumlah Lembaga Desa Yang Aktif</b>		<b>402 Lembaga</b>				<b>DPMD</b>



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>12,610,000,000</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	100%	6,385,000,000	
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Dokumen	110,000,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	55,000,000	APBD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 Laporan	33,000,000	APBD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	22,000,000	APBD
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	3,900,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	3,900,000,000	APBD



<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	100%	750,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	100,000,000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	200,000,000	APBD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180,000,000	APBD
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah</b>	100%	385,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	250,000,000	APBD
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	85,000,000	APBD
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	50,000,000	APBD
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	700,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	300,000,000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150,000,000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	250,000,000	APBD
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	540,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	180,000,000	APBD

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	10 Unit	60,000,000	APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300,000,000	APBD
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			600,000,000	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	100%	600,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	351 Desa	200,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	351 Desa	200,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	10 Unit	200,000,000	APBD
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			600,000,000	
<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	100%	600,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	200,000,000	APBD
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			2,025,000,000	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	100%	2,025,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	150,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	150,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	150,000,000	APBD
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	600,000,000	APBD
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100,000,000	APBD



Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	250,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	50,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	75,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	150,000,000	APBD
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	300,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	351 Desa	50,000,000	APBD
<b>Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan</b>			3,000,000,000	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	3,000,000,000	
Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	351 Lembaga	500,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS dan TMMD)	10 Unit	250,000,000	APBD
Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	500,000,000	APBD

Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitas TTG	2 Laporan	250,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas BBGRM	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitas BBGRM	1 Laporan	150,000,000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	1,350,000,000	APBD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

*Output* Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

RENJA Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja perangkat daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

## 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2023.

Tasikmalaya, Juli 2022

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tasikmalaya,



**Drs. YAYAT SURYATNA**  
NIP. 196600604 199303 1 006